## Lampiran 2b CASCADING PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JAWA BARAT TA. 2016

INSPEKTUR JAWA BARAT							
VISI: Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang profesional untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah							
MISI I: Menyelenggarakan pengawasan internal secara profesional terhadap tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat		MISI II: Meningkatkan peran pembinaan (konseling) aparat pengawasan internal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah			Misi III: Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme aparatur dan kapasitas pengawas internal yang didukung oleh sistem informasi pengawasan yang akurat dan optimal		
TUJUAN 1 TUJUA		TUJUAN 2	TUJUAN 3	TUJUAN 4		TUJUAN 5	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Dan Barang Daerah Yang Akuntabel Dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Meningkatnya Mutu Dan Akuntabilitas Kinerja Opd Dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat		Meningkatnya Kompetensi Dan Kemampuan Aparatur Pengawasan Yang Berkualitas Dan Handal	
Sasaran 1	Sasaran 2	Sasaran 3	Sasaran 4	Sasaran 5	Sasaran 6	Sasaran 7	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas administrasi umum pemerintahan	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah OPD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada OPD Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya nilai pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dan kualitas pelayanan penanganan kasus pengaduan masyarakat	Dipenuhinya kualitas dan kuantitas aparat pengawasan yang optimal untuk pengawasan internal	
1.1. Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional Target : 3,000 poin	2.1. Persentase penurunan jumlah temuan Inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern OPD Provinsi Target: 10%	3.1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Target : 60%	4.1. Persentase OPD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas Target : 50%	5.1. Persentase OPD yang melaksanakan SPIP Target : 50%	6.1. Persentase kualitas nilai indikator RAD-PPK Target : 100%	7.1. Jumlah Auditor dan P2UPD bersertifikasi Target : 80 orang	
		3.2. Persentase penyelesaian TLHP OPD Provinsi dan Bantuan Keuangan Kab/Kota Target: 85%	4.2. Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemprov Jawa Barat Target : B		6.2. Persentase penyelesaian TLHP pengaduan kasus masyarakat Target: 70%	7.2. Jumlah auditor yang telah mengikuti sertifikasi penjenjangan Auditor Madya Target : 15 orang	
		3.3. Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat Target : WTP				7.3. Level kapabilitas Inspektorat Target : II	

## CASCADING PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JAWA BARAT TA. 2016 ESELON III

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG ADMINISTRASI	SEKRETARIS
1.1. Jumlah OPD pelaksana urusan pemerintahan umum, hukum dan HAM yang mampu menyusun LPPD dengan baik Target: 13 OPD	1.1. Jumlah OPD pelaksana urusan pemerintahan umum, hukum dan HAM yang mampu menyusun LPPD dengan baik Target: 16 OPD	1.1. Jumlah OPD pelaksana urusan pemerintahan umum, hukum dan HAM yang mampu menyusun LPPD dengan baik Target : 14 OPD	1.1. OPD Jumlah OPD pelaksana urusan pemerintahan umum, hukum dan HAM yang mampu menyusun LPPD dengan baik Target: 15 OPD	6.1. Persentase kualitas nilai indikator RAD-PPK Target: 100%
2.1. Penurunan jumlah temuan terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern pada OPD pelaksana urusan di bidang pemerintahan umum, hukum dan HAM Target: 10%	2.1. Penurunan jumlah temuan terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern pada OPD pelaksana urusan di bidang perekonomian dan pembangunan Target: 10%	2.1. Penurunan jumlah temuan terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern pada OPD pelaksana urusan di bidang kesejahteraan rakyat Target: 10%	2.1. Penurunan jumlah temuan terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern pada OPD pelaksana urusan di bidang administrasi pemerintahan Target: 10%	6.2. Persentase penyelesaian TLHP pengaduan kasus masyarakat Target : 75%
3.1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Target : 60%	3.1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Target : 60%	3.1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Target : 60%	3.1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Target : 60%	7.1. Jumlah Auditor dan P2UPD bersertifikasi Target: 73 orang
3.2. Persentase penyelesaian TLHP Inspektorat Target: 90%	3.2. Persentase penyelesaian TLHP Inspektorat Target: 90%	3.2. Persentase penyelesaian TLHP Inspektorat Target: 90%	3.2. Persentase penyelesaian TLHP Inspektorat Target: 90%	7.2. Jumlah auditor yang telah mengikuti sertifikasi penjenjangan Auditor Madya Target : 20 orang
4.1. Jumlah OPD pelaksana urusan di bidang pemerintahan umum, hukum dan HAM yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas Target : 10 OPD	4.1. Jumlah OPD pelaksana urusan di bidang perekonomian dan pembangunan yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas Target: 12 OPD	4.1. Jumlah OPD pelaksana urusan di bidang kesejahteraan rakyat yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas Target : 12 OPD	3.3. Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat Target : WTP	7.3. Pemenuhan infrastruktur menuju kapabilitas Inspektorat level II Target : 100%
4.2. Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat Target : A	4.2. Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat Target : A	4.2. Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat Target : A	4.1. Jumlah OPD pelaksana urusan di bidang administrasi pemerintahan yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas Target: 11 OPD	8.1. Persentase pemenuhan semua dokumen perencanaan Inspektorat Target : 100%
5.1. Jumlah OPD pelaksana urusan di bidang pemerintahan umum, hukum dan HAM yang sudah mengimplementasikan SPIP Target: 13 OPD	5.1. Jumlah OPD pelaksana urusan di bidang perekonomian dan pembangunan yang sudah mengimplementasikan SPIP Target: 16 OPD	5.1. Jumlah OPD pelaksana urusan di bidang kesejahteran rakyat yang sudah mengimplementasikan SPIP Target: 14 OPD	4.2. Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat Target : A	8.2. Persentase pemenuhan dokumen pelaporan dan evaluasi kegiatan Inspektorat Target: 100%
7.4. Jumlah bahan kebijakan pengawasan di bidang pemerintahan umum, hukum dan HAM Target : 1 dokumen	7.3. Jumlah bahan kebijakan pengawasan di bidang perekonomian dan pembangunan Target : 1 dokumen	7.3. Jumlah bahan kebijakan pengawasan di bidang kesejahteraan rakyat Target: 1 dokumen	4.2. Jumlah OPD pelaksana urusan di bidang administrasi pemerintahan yang sudah mengimplementasikan SPIP Target: 15 OPD	8.3. Persentase pemenuhan dokumen keuangan Target : 100%
			7.3. Jumlah bahan kebijakan pengawasan di bidang administrasi pemerintahan Target : 1 dokumen	8.4. Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian Target : 100%
				3.1./3.2. Persentase difasilitasinya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP Target: 100%

## CASCADING PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JAWA BARAT TA. 2016 ESELON IV

KASUBAG PERENCANAAN	KASUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN	KASUBAG ADMINISTRASI DAN UMUM
8.2. Persentase diselesaikannya dokumen Revisi Renstra kedua Target: 100%	8.3. Persentase diselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat tahun 2014	8.4. Persentase diselesaikannya dokumen Laporan Keuangan berbasis akrual semester I
	Target: 100%	Target: 100%
8.2. Persentase diselesaikannya dokumen perencanaan kinerja tahun 2016	8.3. Persentase diselesaikannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat tahun 2014	8.4. Persentase diselesaikannya dokumen Laporan Keuangan akhir Target: 100%
Target: 100%	Target: 100%	
8.2. Persentase diselesaikannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2016	8.3. Persentase diselesaikannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Inspektorat tahun 2014	8.4. Persentase diselesaikannya dokumen pendukung laporan keuangan
Target: 100%	Target: 100%	Target: 100%
8.2. Persentase diselesaikannya dokumen Kebijakan Pengawasan tahun 2016-2017 dan Program Kerja Pengawasan Tahunan tahun 2016	8.3. Persentase diselesaikannya laporan realisasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2014 dan triwulanan tahun 2015	8.5. Persentase diselesaikannya dokumen bezzeting kepegawaian tahun 2015
Target: 100%	Target: 100%	Target: 100%
8.1. Persentase pemenuhan Program Kerja Pengawasan Tahunan tahun 2015	3.1. Persentase difasilitasinya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI	8.5. Persentase diselesaikannya kenaikan pangkat pegawai periode April dan Oktober
Target: 100%	Target: 100%	Target: 100%
6.1. Persentase pemenuhan dokumen pelaksanaan dan pelaporan RAD-PPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun	3.2. Disusunnya dokumen hasil tindak lanjut pemutakhiran data APIP Target : 100%	7.1./7.2. Jumlah Auditor dan P2UPD yang telah mempunyai sertifikat fungsional dan sertifikat pengendali teknis
2015-2016 Toward t 100%		Target : 73 orang dan 20 orang
Target: 100%		
6.2. Persentase penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat	8.3. Persentase diselesaikannya petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014	4.2. Persentase pemenuhan infrastruktur pendukung tugas pembinaan dan pengawasan
Target: 100%	Target: 100%	Target: 100%

## KETERANGAN WARNA

